Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

## EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK DI KOTA PALEMBANG

Annisa Putri Ramadanti<sup>1</sup>, Nengyanti<sup>1</sup>, Dwi Mirani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya

Email: nengyanti@fisip.unsri.ac.id

## RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 1/01/2022 Ditelaah: 15/03/2020 Diterbitkan: 06/06/2020

#### **KUTIPAN**

Annisa Putri Ramadanti (2023). Efektivitas Program Pelayanan KeluargaBerencana Bergerak Di Kota Palembang PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) 2023, 001-013, doi: x xx



#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektifan program pelayanan keluarga berencana bergerak di kota palembang dan mengetahui hubungan karakteristik responden terhadap keefektifan program pelayanan keluarga berencana bergerak. Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas program menurut Budiani (2007) yang terdiri dari 4 indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sampel dari penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pelayanan keluarga berencana bergerak di Kota Palembang tergolong kategori sangat efektif dengan skor 81,45%. Namun indikator sosialisasi program memilik skor terendah yaitu 79,10% dibandingkan indikator lainnya. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa hanya karakteristik responden usia yang terdapat hubungan dengan indikator sosialisasi program dan karakteristik usia yang terdapat hubungan dengan indikator pencapaian tujuan program. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa hendaknya sosialisasi pelayanan KB bergerak lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat khususnya memiliki rentang umur >35 tahun agar penyuluh KB menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Kata Kunci: program, pelayanan, keluarga berencana, bergerak

#### **Abstract**

This study aims to measure the level of effectiveness of the mobile family planning service program in the city of Palembang and determine the relationship between respondent characteristics and the effectiveness of the mobile family planning service program. This research uses the concept of program effectiveness according to Budiani (2007) which consists of 4 indicators, namely accuracy of program targets, socialization program, achievement of program objectives and program monitoring. This research uses mixed methods with a sequential explanatory strategy. The data collection techniques used were documentation, interviews and distributing questionnaires. The sample of this research consisted of 100 respondents. The research results show that the effectiveness of the mobile family planning service program in Palembang City is classified as very effective with a score of 81.45%. However, the program socialization indicator has the lowest score, namely 79.10% compared to other indicators. The cross tabulation results show that only age characteristics of respondents are related to indicators of program socialization and age characteristics are related to indicators of achieving program goals. The results of this research recommend that socialization of mobile family planning services should be further improved

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 001-013, 2020

Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

among the community, especially those with an age range of >35 years, so that family planning instructors use language that is easy to understand by paying attention to the wisdom of the local community.

Keywords: Program, Services, Mobile. Family Planning

## **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman segala aspek kehidupan juga turut mengalami perkembangan termasuk manusia yang lahir di muka bumi. Hal inilah yang akan memicu pertumbuhan penduduk yang meningkat yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dalam bidang kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga yang menyebutkan bahwa"Keluarga Berencana ialah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas".

Untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan dengan Keluarga Berencana tersebut,maka pemerintah sebagai *Policy Maker* telah berupaya dengan membuat berbagai kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana demi berkurangnya masalah kependudukan yang ada. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk tersebut adalah melalui pelaksanaan program "Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak"

Biasanya, program ini dilaksanakan di Posyandu atau Puskesmas Pembantu (Pustu), Klinik, Praktek Bidan atau bisa juga di puskesmas setempat di setiap Kecamatan di Kota Palembang. Namun, jika tempat tersebut berhalangan untuk digunakan, maka pelayanan hanya akan dilaksanakan di Mobil Pelayanan KB (Muyan KB) yang memang sudah ada dari pemerintah dan mendirikan tenda di tempat yang dinilai cukup strategis. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak ini bersifat dinamis bukan statis. Artinya, program yang diciptakan ini sifatnya ialah menjemput bola. Petugas akan mendatangi 18 kecamatan di Kota Palembang secara bergiliran, tempat yang akan diadakannya program KB Bergerak ini, sehingga calon akseptor tidak perlu jauh-jauh pergi ke rumah bidan atau rumah sakit setempat.

Pada tahun 2018, target capaian pelayanan MKJP yaitu IUD dan Implant sebanyak 30 Akseptor. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa 18 kecamatan di Kota Palembang telah mendapatkan layanan KB Bergerak ini. Tercatat ada 15 Kecamatan yang telah terpenuhi target pencapaian akseptornya. Namun sayangnya terdapat 3 Kecamatan yang tidak terpenuhi yaitu di wilayah kecamatan Jakabaring (22 akseptor), Ilir Timur Tiga (14 akseptor), dan Kertapati (24 Akseptor).

Pada tahun 2019, target capaian pelayanan MKJP yaitu IUD dan Implant sebanyak 40 Akseptor. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata setiap kecamatan telah mendapatkan pelayanan KB Bergerak ini. Adapun kecamatan yang tidak mencapai target akseptor adalah kecamatan Seberang Ulu Dua pada termin pertama yaitu bulan April hanya 27 Akseptor namun pada bulan Agustus mencapai target yaitu sebanyak 71 Akseptor. Lalu Kecamatan Kemuning 22 Akseptor, Kecamatan Sukarami yaitu pada Bulan Juli 14 Akseptor dan bulan selanjutnya masih dibawah target yaitu 38 Akseptor, Kecamatan Plaju 38 Akseptor, Kecamatan Seberang Ulu Satu 30 Akseptor, dan Kecamatan Kertapati sebanyak 24 Akseptor. Namun pada tahun 2019 terdapat 5 Kecamatan yang tidak mendapatkan kunjungan Pelayanan KB Bergerak ini yaitu Kecamatan Ilir Barat Satu, Kecamatan Ilir Barat Dua, Kecamatan Sako, Kecamatan Ilir Timur Dua, dan Kecamatan Jakabaring.

Berdasarkan data capaian hasil program Pelayanan KB bergerak diatas ada beberapa Kecamatan yang tidak dikunjungi dan tidak mendapatkan pelayanan KB Bergerak ini. Disamping itu juga masih ada

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 001-013, 2020



Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

beberapa kecamatan yang tidak memenuhi target pencapaian jumlah akseptor. Hal tersebut membuktikan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan sosialiasi mengenai pentingnya ber-KB dan kurangnya dukungan dari pihak suami/istri atau keluarga dari masyarakat setempat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang beralih kepada KB Swasta di Klinik atau Bidan setempat dan mengabaikan program ini.

Dilihat dari beberapa Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program yakni: di lihat dari Sasaran Program. Sasaran Program dalam hal ini adalah Pasangan Usia Subur. Efektivitas sasaran dilihat dari Jumlah PUS sebagai peserta KB aktif selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang tiap tahun mengalami penurunan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai Program Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Kota Palembang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan mengukur keefektifan Program Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Kota Palembang dan untuk mengetahui hubungan karakteristik responden terhadapi keefektifa Program Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana keefektifan Program Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Kota Palembang dan bagaimana hubungan karakteristik responden terhadapi keefektifan Program Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Kota Palembang?

#### TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa "Efektitivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Sedangkan menurut Pasolong (2007:9), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Menurutnya efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karna adanya proses kegiatan.

Menurut Sinambela (2008:5), pelayanan publik merupakan pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam memberikan layanan oleh pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak merupakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan disuatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan Pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bakti sosial ataupun sejenisnya; dengan maksud untuk mendekatkan akses pelayanan KB yang bisa dilakukan dengan kunjungan pelayanan dan atau menggunakan fasilitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak

Keluarga Berencana (KB) Bergerak adalah sebuah program pelayanan dengan memberikan pelayanan KB berupa pemasangan alat kontrasepsi secara gratis kepada akseptor/peserta KB khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan mendatangi setiap kecamatan di Kota Palembang (bersifat dinamis/keliling). Dalam pelaksanaanya, DPPKB juga bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan setempat di setiap kecamatan baik dari Puskesmas, Klinik, Praktik Bidan Mandiri untuk membantu dalam proses pelayanan terkait dengan kesediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan tim medis.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 001-013, 2020

Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

Metode kontrasepsi jangka panjang yang diutamakan dalam pelayanan KB Bergerak ini adalah *Intera Uterine Device* (IUD) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) menurut Halodokter, IUD, singkatan dari "intrauterine device". Berbentuk seperti "T" dan sedikit berukuran sekitar 3 cm. IUD akan dipasang dalam rahim dan mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur, Implant/Susuk KB menurut Halodokter, KB implan atau KB susuk adalah kontrasepsi yang mengandung hormon progestogen. KB yang berbentuk tabung mirip korek api ini digunakan dengan cara dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas. KB implan mencegah kehamilan dengan cara melepaskan hormon progesteron ke aliran darah.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mix Methods*, menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Strategi dalam *mixed method* yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi metode campuran sekuensial terutama strategi eksplanatoris sekuensial. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data kuantitatif. Kemudian pada tahap kedua mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Analis Hasil Data Kuantitatif**

## a. Indikator Ketepatan Sasaran Program

Diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian ini menjawab Baik terhadap kinerja petugas administrasi dalam mendata dan menangani akseptor yaitu sebanyak 54 orang (54,0%). Mayoritas responden menjawab Sangat Cermat terhadap kecermatan petugas dalam memberikan pelayanan KB baik IUD maupun implan kepada akseptor KB yaitu sebanyak 50 orang (50,0%). Mayoritas responden menjawab Tanggap terhadap daya tanggap petugas dalam memberikan pelayanan KB Bergerak baik IUD maupun Implan kepada akseptor KB yaitu sebanyak 55 orang (55,0%). Mayoritas responden menjawab Baik terhadap keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu medis dalam proses pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 64 orang (64,0%). Mayoritas responden menjawab Baik terhadap pengetahuan petugas dalam memberikan konseling pra pelayanan dan pasca pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 68 orang (68,0%). Mayoritas responden menjawab Baik terhadap respon petugas dalam menjawab keluhan yang dirasakan akseptor dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dipilih akseptor yaitu sebanyak 71 orang (71,%). Mayoritas responden menjawab Baik terhadap respon petugas dalam menjawab resiko efek samping (komplikasi) yang dirasakan akseptor dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dipilih akseptor yaitu sebanyak 67 orang (67,0%). Hampir seluruh responden menjawab Adil terhadap keadilan petugas dalam pemberian pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 67 orang (67,0%). Mayoritas responden menjawab Sesuai terhadap ketepatan waktu pada saat proses berlangsungnya pemberian pelayanan KB Bergerak baik IUD maupun Implan yaitu sebanyak 71 orang (71,0%). Mayoritas responden menjawab Mudah terhadap kemudahan akses menuju lokasi pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 78 orang 78,0%).

## b. Indikator Sosialisasi Program

Diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian ini menjawab Siang Hari saat waktu sosialisasi program melalui KIE KB Keliling yaitu sebanyak 63 orang (63,0%). Mayoritas responden menjawab Pertemuan Warga terhadap cara penyampaian informasi yang dilakukan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tentang Pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 71 orang (71,0%). Mayoritas responden menjawab Cukup Jelas terhadap bahasa yang digunakan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) DPPKB Kota Palembang pada saat sosialisasi KB keliling melalui Mupen (Mobil Penerangan yaitu sebanyak 82 orang (82,0%). Mayoritas responden menyatakan bahwa media penyuluhan (spanduk) dapat

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 001-013, 2020



Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

memudahkan mereka dalam mengetahui informasi Pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 78 orang (78,0%). Mayoritas responden menjawab adanya informasi melalui sosial media dapat memudahkan responden dalam mengetahui informasi Pelayanan KB Bergerak yaitu sebanyak 82 orang (81,0%).

## c. Indikator Pencapaian Tujuan Program

Diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian ini menjawab Mengatur kelahiran untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pada tujuan dari program KB (Keluarga Berencana) yaitu sebanyak 50 orang (50,0%). Sedangkan 37 orang (82,2%) dari 45 orang yang menggunakan IUD/AKDR sebagai alat ganti KB mengatakan bahwa IUD/AKDR merupakan alat yang dapat digunakan lama hingga 10 tahun. Selain itu, 30 orang (66,7%) dari 45 orang yang menggunakan IUD/AKDR sebagai alat ganti KB menyatakan bahwa efek samping yang sering dirasakan selama menggunakan IUD/AKDR adalah Haid terasa lama dan banyak. Di sisi lain, 34 orang (75,6%) dari 45 orang yang menggunaka IUD/AKDR sebagai alat ganti KB menyatakan bahwa periksa dan kontrol IUD/AKDR diperlukan jika hanya bisa terasa nyeri/pendarahan. Seluruh responden (55 orang) yang menggunakan Implan/Susuk sebagai alat ganti KB menyatakan bahwa Implan/Susuk merupakan alat KB yang dimasukan ke dalam kulit. Sementara itu, 29 orang (52,7%) dari 55 orang yang menggunakan Implan/Susuk sebagai alat ganti KB menyatakan bahwa salah satu efek samping implan adalah nyeri/ bengkak pada bagian lengan. Sementara itu, 38 orang (69,1%) dari 55 orang yang menggunakan Implan/Susuk sebagai alat ganti KB akan mengganti atau mengontrol implan/susuk setiap tahun. Sebagian Besar responden baik yang menggunakan IUD/AKDR dan Implan/Susuk sebagai alat KB pengganti sebanyak 69 orang (69,0%) memberi alasan memilih metode KB tersebut karena penggunaan kedua alat/cara KB tersebut dapat digunakan hingga 10 Tahun.

#### d. Indikator Pemantauan Program

Diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian ini menjawab pihak dari kecamatan telah berupaya Membantu demi kelancaran proses pelayanan yaitu sebanyak 56 orang (56,0%). Mayoritas responden menjawab tenaga medis telah berupaya Membantu dalam menangani keluhan akseptor yaitu sebanyak 62 orang (62,0%). Setelah dilakukan perhitungan dengan mencari rata-rata efektivitas per 4 indikator setiap kecamatan di Kota Palembang berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner rata-rata presentase efektivitas program pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Kota Palembang adalah sebesar 81,45. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pelayanan KB Bergerak di Kota Palembang sangat efektif.

#### **Analis Hasil Data Kualitatif**

## a. Ketepatan Sasaran Program

Menurut Kasi Jaminan Pelayanan KB DPPKB Palembang, mengatakan bahwa target pemenuhan akseptor pada tahun 2018 adalah 30 akseptor dan pada tahun 2019 sebanyak 40 akseptor. Semua kecamatan rata-rata menunjukkan hasil melampaui ketercapaian target meskipun ada beberapa kecamatan yang tidak melampaui target, yaitu: pada tahun 2018: Kecamatan Jakabaring, dan Ilir Timur Tiga. Sementara itu pada tahun 2019 terdiri dari Kecamatan Kemuning, Sukarami, Plaju, Seberang Ulu Satu dan Kertapati.

## b. Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil kuantitatif, masyarakat yang berusia 20-35 tahun sangat efektif memiliki proporsi sebesar 46,4% sedangkan responden yang berusia > 35 tahun dengan kategori dimensi sosialisasi program sangat efektif memiliki proporsi sebesar 75,0%. Menurut Korwil KB Kecamatan Alang-Alang Lebar mengatakan bahwa menurutnya penyebabnya adalah karena masyarakat khususnya ibu-ibu yang berusia >35 tahun kebanyakan berada dirumah dibandingkan dengan masyarakat berusia produktif dengan rentang umur 20-35 tahun yang sibuk bekerja. Selain itu orang-orang yang sering berkumpul dalam kelompok warga adalah ibu-ibu yang berusia sekitar 35 tahun keatas.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 001-013, 2020



Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

## c. Pencapaian Tujuan Program

Program pelayanan KB Bergerak ini dikatakan berhasil apabila masyarakat merasakan dampaknya dengan hadirnya program KB Bergerak ini. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh menuju fasilitas kesehatan dan tentunya tidak perlu mengeluarkan biaya karena pelayanan ini gratis. Selain itu untuk kunjungan ulang pun masih dipantau dan dilayani oleh fasilitas kesehatan terkait

## d. Pemantauan Program

Kecamatan Alang-Alang Lebar menjadi kecamatan dengan Akseptor terbanyak yang ikut serta dalam Pelayanan KB Bergerak di Kota Palembang. Kecamatan ini merupakan kecamatan baru pengembangan dari kecamatan Sukarami, kecamatan ini berbatasan langsung dengan kabupaten Banyuasin. Pelayanan KB Bergerak di kecamatan ini dilaksanakan di Klinik Bidan Lismarini yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa. Sedangkan Kecamatan Kertapati menjadi kecamatan terendah dalam pemenuhan akseptornya. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan seberang ulu 1 pada tahun 2000 yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir

# KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Program pelayanan KB Bergerak di Kota Palembang menunjukkan hasil sangat efektif sebesar 81,45% dilihat dari hasil perhitungan rata-rata presentase efektivitas yang dilakukan peneliti yaitu indikator :Ketepatan sasaran program :83,65%, Sosialisasi program :79,10%, Pencapaian tujuan program :83,75% dan Pemantauan program :79,27%
- 2. Perhitungan hasil tabulasi silang antar karakteristik responden terhadap keempat indikator efektivitas program menunjukkan bahwa karakteristik 'usia' dengan 'indikator sosialisasi program' dan karakteristik 'usia' dengan 'indikator pencapaian tujuan program' yang terdapat hubungan.
- 3. Indikator sosialisasi program menunjukkan hasil paling rendah (79,10%) dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sosialisasi program, penggerak KB hendaknya memperhatikan karakteristik usia khususnya masyarakat berusia > 35tahun yang paling dominan dalam kuesioner. Untuk masyarakat dengan rentang umur > 35tahun, penggerak KB hendaknya dalam cara penyampaian sosialisasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan memahami kearifan lokal masyarakat setempat.
- 4. Faktor keberhasilan dari program pelayanan kb bergerak ini adalah karena adanya balai KB di setiap kecamatan setempat, peran tenaga medis yang handal dan ramah, serta peran penggerak KB khususnya Kader KB untuk mengajak masyarakat.
- 5. Faktor penyebab masih rendahnya keikutsertaan KB adalah karena adanya anggapan banyak anak banyak rezeki, khawatir merasa kesepian, keinginan mendapatkan anak jenis kelamin berbeda dan kurangnya dukungan suami
- 6. Keberhasilan program KB di Kota Palembang ditandai dengan menurunnya TFR pada tahun 2019 menjadi 2,14%. CPR menjadi 69,06% dan MKJP sebesar 25,15.

#### **SARAN**

- 1. Untuk DPPKB Kota Palembang, agar pelayanan KB Bergerak ini dapat terus berhasil dan efektif diperlukan dukungan dari berbagai pihak, koordinasi dan kerjasama yang erat untuk kesuksesan program ini khsususnya dari Bidang Keluarga Berencana. Penguatan penggerakan kader KB, pelatihan dan bimbingan kepada penggerak KB diperlukan agar setiap tahunnya program pelayanan KB ini semakin maju dan terus berinovasi demi tercapainya visi misi DPPKB Kota Palembang.
- 2. Untuk para penggerak KB di setiap kecamatan dan para mitra kerja, agar lebih diperkuat kerjasamanya dengan rekan-rekan penggerak untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai KB serta dalam proses sosialisasi hendaknya memahami karakteristik budaya masyarakat setempat



ISSN(p): 2746-6523, ISSN(e): 2722-6891 Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id

dengan memperhatikan cara penyampaian informasi (sosialisasi).

3. Untuk akseptor KB, agar untuk terus menggunakan kontrasepsi dan diharapkan tidak putus mengingat pelayanan KB Bergerak ini gratis. Diharapkan dengan keahadiran program Pelayanan KB ini dapat membantu dan mewujudkan keluarga yang sejahtera demi pembangunan Kependudukan bangsa Indonesia yang lebih baik.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 001-013, 2020

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. CV. Pustaka Setia.
- Astuti, W. S., & Laksmono, B. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. *PAPATUNG*, *3*(3). http://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/323
- Azwari, S. (2010). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
- Bappenas, & Bappeda. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Badan Pusat Statistik.https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi\_Penduduk\_Indone sia 2010-2035.pdf
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 53.
- BKKBN. 2014. "Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana DalamJaminan Kesehatan Nasional". Jakarta: DITJALPEM BKKBN.
- BKKBN, 2018, "Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak". Jakarta Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.
- Dwijayani, L., & Sahara, T. (2021). Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak Wilayah Perbatasan dan Kepulauan di 34 Provinsi Tahun 2019. *Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 68–76.https://ojs.poltekkesmalang.ac.id/index.php/JIKI/article/download/2163/346.
- Fitri. (2018). Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar [UIN Alauddin Makassar]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12751/1/EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM.pdf
- Hayati S, M., Susanto, H., & Mulyani, S. (2020). Efektivitas Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *MAP Universitas Wijaya Putra*, 3(3). http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/268
- Lubis, & Husein. (2007). *Efektivitas Pelayanan Publik*. Pustaka Binaman Presindo.Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Merrynce, & Hidir, A. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. *Kebijakan Publik*, 4(1). https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/1329/1319
- Pasrah S.D, R., Putro, T. S., & Indrawati, T. (2014). Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru. *Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, *I*(2). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/4739
- Rahma, M. (2016). Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pelaksanaan Program KB Dinamis/Tim KB Keliling (Analisis Terhadap Implementasi Program KB Dinamis/TKBKDi Kabupaten Pringsewu) [Lampung]. https://adoc.tips/download/tim-kb-keliling.html
- Ratnawati, E. T., Susanto, H., & Sulistyowati, A. (2021). Peningkatan Kualitas Pelayanan KB sebagai Upaya Pembinaan Akseptor di Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. *Manajemen Dan Administrasi Publik*, 4(2). http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/issue/view/36
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992. (1992). Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Dalam Undang-Undang Keluarga Berencana. Bagian I. Pasal: Jakarta.

- Rusmin, M., Satrianegara, M. F., Ibrahim, H., Lagu, A. M. H., & Rahma, N. (2019). Gambaran Penatalaksanaan Program KB Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. *Al-Shihah*, *11*(1). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/9424
- Sari, R. W., Syahrir, G., & Usman. (2020). Efektivitas Program Keluarga Berencana Implant dalam Menekan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang. *Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, *3*(1). https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes/article/view/295
- Sedarmayanti. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. CV. Mandar Maju.
- Sondang, P. S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.Strees, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. PPM Erlangga.
- Sudarmi, Rumintang, B. I., & Namjahah, I. (2021). Konseling dan Pelayanan KB Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kelurahan Monjok Kota Mataram. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian*, *1*(1). http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/issue/view/1
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Pers UGM.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992. (1992). Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Dalam Undang-Undang Keluarga Berencana. Bagian II. Pasal: Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009. (2009). Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Bab I Pasal I.
- Winardi, J. (2014). Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Rajawali Press.